

SAAT AK TERIMA LU



Oleh: Adrianus Meliala *)

Penulis pernah mempertanyakan di majalah ini, apakah eksperimen Akpol akan berlangsung ajeg dan permanen? Dikhawatirkan oleh penulis, kebijakan yang belum paripurna ini hanya berjalan pada era Kapolri Soetanto saja (lihat Jagratara edisi Desember 2007). Kekhawatiran ini, menurut penulis, beralasan mengingat reputasi Polri selama ini perihal mengganti dan membuat kebijakan baru.

TERNYATA, tidak perlu menunggu lama, pada tahun 2010 ini pertanyaan itu telah terjawab. Eksperimen tersebut secara tidak langsung dinyatakan gagal. Akpol akan kembali hanya menerima lulusan SLTA atau SMU. Sementara intake sarjana hanya mencapai 3 angkatan saja. Tapi, apa sebenarnya eksperimen Akpol itu?

Alkisah, sepanjang masa kepemimpinan Kapolri Soetanto, beberapa kali yang bersangkutan melakukan gebrakan. Selain perintah agar judi diberantas dan pembersihan KKN dari segala kegiatan penerimaan personil Polri, maka yang juga cukup menggetarkan adalah kebijakan sarjana masuk Akpol itu. Walau dikategorikan sebagai lembaga pendidikan tingkat diploma, tapi peserta didiknya adalah sarjana (bahkan magister pun ada).

Cara berpikir dibalik kebijakan itu sebenarnya logis juga. Disinyalir, perwira lulusan Akpol masih terlalu belia untuk menjadi pimpinan unit. Dengan usia yang masih 20 tahunan awal, dan dengan pengalaman kerja amat minim, maka kepemimpinan lapangannya amat diragukan. Akibatnya, perwira belia ini mudah dikerjai anak buah (yang memang lebih berpengalaman) atau bisa juga menjalankan kepemimpinan yang kompromistis saja. Dengan menghasilkan perwira yang berusia lebih tua, sudah sarjana pula, maka kematangan kepribadian plus pengetahuan akan tercapai dengan

sendirinya.

Walaupun kebijakan itu logis dan pasti baik dari segi niat, ada beberapa kelemahan yang ditemui sejak awal perencanaannya. Pertama, kebijakan itu dibuat bukan berdasarkan hasil evaluasi yang memadai, tapi nampaknya lebih dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari saja. Kedua, walaupun pengalaman itu benar, maka kebijakan yang diambil sebenarnya tidak harus men-sarjana-kan taruna Akpol. Jadi, ada unsur preferensi disini. Akibatnya, dalam rangka membenarkan preferensi itu, banyak hal kemudian ditabrak.

Dalam tulisan di majalah ini pada edisi Desember 2007 tersebut, penulis telah menguraikan secara amat gamblang perihal amat tidak idealnya menampung peserta didik yang beragam, ada yang lulusan SLTA/SMU dan ada yang sarjana, dalam suatu lembaga didik dengan kurikulum dan pengajar yang sama. Pembedanya hanya satu: lama masa didik. Hal itu bukannya tidak disadari oleh berbagai kalangan di dalam Polri waktu itu, cuma nampaknya tidak ada yang berani membantah kemauan Kapolri Soetanto. Jadi, ini benar-benar suatu eksperimen.

Saat kepemimpinan Polri berganti, penulis mendengar telah ada upaya "menggoyang" eksperimen tersebut. Konon sebelumnya telah dilakukan survei saat era Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang hasilnya, kurang lebih, relatif lebih rendahnya kinerja akademik taruna sarjana ketimbang taruna

POL KEMBALI LUSAN SLTA

lulusan SLTA/SMU. Lalu, karena sudah sarjana, para taruna bergelar akademik itu relatif sulit dibentuk kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang sengaja ditumbuhkan dalam Polri.

Ada lagi faktor yang dulu dianggap nilai plus, sekarang malah dianggap minus. Faktor itu adalah usia pakai. Jalan pemikiran Kapolri Soetanto adalah menghargai para taruna sarjana dengan "tabungan" masa dinas yang lebih banyak, yang memungkinkannya naik pangkat lebih cepat dari taruna SLTA/SMU. Belakangan, hal itu dianggap sebagai faktor negatif, karena berpotensi menimbulkan kecemburuan pada sesama taruna lain namun berasal dari SLTA/SMU.

Penulis melihat, pimpinan Polri dewasa ini cukup sincere atau tulus mengadakan perubahan ini semata-mata melihat bahwa situasi akan lebih detrimental (menuju ke arah pemburukan) jika dipertahankan terus. Walau berpotensi dikecam masyarakat sebagai organisasi yang tidak konsisten, nampaknya pil pahit itu memang harus ditelan.

Selanjutnya, untuk mengangakat citra yang pasti menurun, karena dianggap plin-plan dan impulsif (mengikuti kata hati pimpinan), Polri nampaknya perlu me-launching satu paket kebijakan guna disosialisasikan ke masyarakat. Paket tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa rekrutmen sumber SLTA/SMU adalah untuk kebaikan masyarakat dan Polri

sendiri, bukan untuk kepentingan beberapa pihak yang ingin anaknya masuk Akpol. Sosialisasi ini penting untuk menepis keraguan masyarakat tentang latar belakang kebijakan baru tersebut.

Kedua, bagi para sarjana dan magister, tetap tersedia kesempatan untuk masuk Polri, yakni melalui jalur PPSS (Program Pendidikan Sumber Sarjana). Kuotanya pun besar. Hal ini penting dikemukakan agar tidak menutup harapan anggota masyarakat yang tetap ingin dirinya atau pufranya menjadi anggota Polri.

Kedua, setelah diterima, taruna dari sekolah menengah tersebut akan lebih lama berada dalam pendidikan guna mencapai gelar sarjana kepolian, dan tidak lagi hanya berkualifikasi D3. Terkait ini, maka agar konsisten, sebutan 'akademi' bagi Akpol memang tidak bisa dipertahankan. Implikasi lain, jika Akpol kemudian menjadi sekolah tinggi bagi ilmu kepolisian, lalu STIK PTIK yang ada di Jakarta mau diapakan?

Ketiga, sejalan dengan pertanyaan soal STIK PTIK, maka perlu diinformasikan kepada masyarakat perihal reformasi menyeluruh terkait sistem pendidikan Polri (berikut lembaga-lembaga pendidikannya). Sebelum restrukturisasi yang terakhir ini, maka struktur lemdik Polri memang cukup memusingkan perihal mengapa lemdik A berada dibawah B dan tidak dibawah C, demikian pula bedanya lemdik A dibanding lemdik B dan

seterusnya. Beruntung sekarang terdapat lembaga Lemdikpol yang mengatasi seluruh lembaga pendidikan Polri, mulai tingkat SPN hingga Sespati, sehingga memungkinkan integrasi yang menyeluruh mulai dari kurikulum hingga pelaksanaan pendidikan.

Keempat, terkait dengan integrasi semua lemdik dibawah Lemdikpol, maka perlu diinformasikan juga bahwa terdapat kesempatan yang lebih besar bagi taruna Akpol untuk menggunakan sarana pendidikan yang "wah" milik JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation). Selama ini, penulis melihat, keberadaan JCLEC masih seperti enclave yang terasing dari komunitas Akpol itu sendiri.

*) Adrianus Meliala
Kriminolog UI
adrianus@ui.ac.id